

Merekatkan Kembali Semangat Nasionalisme

Rahmat Teguh Santoso Gobel

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : rtsg@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini yaitu menganalisis bentuk pengikisan nasionalisme yang berkembang saat ini serta upaya seperti apa untuk merekatkan kembali semangat nasionalisme. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa Pertama, salah satu dampak negatif dari reformasi adalah mudahnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Menguatnya isu SARA, gerakan separatis, kekerasan, tindakan teroris dan tumbuhnya feodalistik memicu degradasi nasionalisme yang berujung pada instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi yang demikian menjadi ancaman bagi Indonesia apabila kelompok masyarakat sudah ditunggangi oleh korporasi/negara lain untuk dijadikan alat pemberontakan dan pengacau dalam negara. Kedua, Penanaman nilai-nilai nasionalisme adalah pilihan yang tepat untuk mereduksi gerakan negatif yang ingin memecah-belah bangsa. Nasionalisme Indonesia adalah bercita rasa integralistik yang substansinya tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan memadukan segala keanekaragaman menjadi suatu persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan berbangsa dan negara. Semangat nasionalisme harus digelorakan kepada semua warga negara guna memperkokoh keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua stakeholder khususnya di lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai-nilai nasionalisme dalam diri warga negara.

Kata Kunci : *Merekatkan, Nasionalisme dan Bela Negara.*

I. PENDAHULUAN

Pada era transisi politik pasca Orde Baru, tatkala berbagai kerusuhan atau konflik sosial terjadi di berbagai daerah, banyak yang mengkhawatirkan, setidaknya mencemaskan masa depan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat ini kita mencatat bahwa memang, dalam konteks integrasi bangsa, masih terdapat berbagai potensi ancaman. Separatisme di Aceh sudah mereda, demikian pula ada formula kebijakan dalam menangani masalah Papua yang lebih kompleks ketimbang semata persoalan potensi separatistis. Secara umum kini kondisinya sudah relatif tenang, terutama ketika formula pembangunan nasional tak lagi terlampaui sentralistik.¹

Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatasnamakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa; seolah ke-*Bhinneka*-an kita telah kehilangan *Tunggal Eka*-nya. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama.

Semangat untuk membela negara seolah telah memudar di tengah-tengah munculnya ideologi transnasional yang “berbaju Islam”. Padahal membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad, dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa.²

¹M Alfian Alfian, *Refleksi Nasionalisme Indonesia di Era Pragmatisme Global*, *Jurnal Sekretariat Negara RI*, No. 17, Agustus 2010, hlm 123

²Abdul Mustaqim, *Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*, *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, hlm 110

Menelisik kondisi ketegangan orde baru mungkin adalah hal yang sulit dilakukan di era penuh kebebasan berpendapat dan berserikat. Sebab, kebijakan pengamanan yang dilakukan dengan pendekatan militer menunjukkan tingkat keamanan yang relatif stabil. Makanya pendekatan militer yang akan ditempuh dalam menengahi berbagai konflik yang terjadi di era reformasi ini justru akan merobohkan resolusi konstruksi ke-indonesia-an pasca orde baru. Artinya konflik yang muncul bukan harus diselesaikan dengan pendekatan militer, tetapi dilakukan dengan cara-cara yang elegan tanpa dengan kekerasan. Disintegrasi, gerakan separatis dan aksi terorisme adalah problem sosial masyarakat yang harus diselesaikan melalui kebijakan nasionalisme *top-down*. Bela negara adalah wacana yang mengemuka, dimana rel kebijakan ini dipercayai sebagai upaya menginternalisasi spirit ke-indonesia-an.

Wacana Bela Negara sesungguhnya menanamkan etos: cinta tanah air, cinta bangsa; dan cinta bahasa dan budaya. Bela Negara, boleh dikatakan, semacam revitalisasi semangat Sumpah Muda karena mengandung nilai-nilai Cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan ketahanan bangsa yang mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi (termasuk ketahanan pangan), sosial, budaya dan militer. Semua lini ketahanan bangsa Indonesia saat ini, sejujurnya, makin merosot hingga pada tingkat yang sungguh mengkhawatirkan.

Jika bangsa Jepang sejak duduk di bangku SD sudah ditanamkan nilai-nilai Cinta Tanah Air dan Patriotisme, antara lain, melalui hormat dan cinta mereka kepada Sadoko Sasaki, bangsa Indonesia pun sejak dini seyogianya ditanamkan 4 nilai Bela Negara itu. Mungkin saja ada pihak-pihak yang meragukan keberhasilan penanaman nilai-nilai Bela Negara karena sejak 20 tahun terakhir bangsa kita dicekoki habis-habisan oleh nilai-nilai destruktif yang sebagian berasal dari budaya luar. Akan tetapi, jika tidak ada yang berani melakukan gerakan nasional

merevitalisasi nilai-nilai Sumpah Pemuda, Indonesia hampir dipastikan akan semakin terpuruk.³

Memahami kondisi diatas, nilai-nilai nasionalisme mulai mengikis sehingga konflik sosial masih menjadi mendominasi permasalahan bangsa. Dengan demikian perlu dianalisis sejauhmana perkembangan penanaman nilai-nilai nasionalisme dan upaya yang harus dilakukan untuk menata bangsa yang berpondasi pada semangat nasionalisme Indonesia. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam artikel ini adalah: Bagaimana bentuk aliran nasionalisme yang berkembang saat ini? Dan Upaya seperti apa untuk merekatkan kembali semangat nasionalisme?. Kedua pertanyaan tersebut akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

II. PEMBAHASAN

a. Bentuk Aliran Nasionalisme yang berkembang

Indonesia sendiri nasionalisme bukan merupakan sesuatu yang sudah sejak dulu ada. Ia baru lahir dan mulai tumbuh pada awal abad ke-20, seiring dengan lahir dan tumbuhnya berbagai bentuk organisasi pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan dan sistem pemerintahan negara bangsa yang demokratis. Tampak pula bahwa nasionalisme di Indonesia merupakan sesuatu yang hidup, yang bergerak terus secara dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, bahkan sampai sekarang. Makna nasionalisme sendiri tidak statis, tetapi dinamis mengikuti bergulirnya masyarakat dalam waktu.

Nation berasal dari bahasa Latin *natio*, yang dikembangkan dari kata *nascor* (saya dilahirkan), maka pada awalnya nation (bangsa) dimaknai sebagai “sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama” (*group of people born in the same place*). Kata ‘nasionalisme’ menurut Abbe Barruel untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukan bagi

³Tjipta Lesmana, *Bela Negara Dan Ancaman Budaya Kekerasan*, Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan, Puskom Publik Kemhan, Jakarta, 2016, hlm 24-25

para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu (di kampus yang baru dan daerah baru) tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa/suku asal mereka.⁴

Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa dan daerah asal usul semula. Rasa cinta seperti itu dewasa ini disebut semangat patriotisme. Jadi pada mulanya nasionalisme dan patriotisme itu sama maknanya. Namun sejak revolusi Perancis meletus 1789, pengertian nasionalisme mengalami berbagai pengertian, sebab kondisi yang melatarbelakanginya amat beragam. Antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Nasionalisme bukan lagi produk pencerahan Eropa tetapi menjadi label perjuangan di negara-negara Asia-Afrika yang dijajah bangsa Barat.⁵

Menurut Snyder, nasionalisme sebagai satu emosi yang kuat yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan rakyat sejak revolusi Perancis. Ia tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan satu gejala sejarah, yang timbul sebagai tanggapan terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial tertentu. Sementara itu Carlton Hayes, seperti dikutip Snyder membedakan empat arti nasionalisme:

- 1) Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan imperium kelembagaan negara nasional modern.
- 2) Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses sejarah aktual.
- 3) Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan proses historis dan satu teori politik.
- 4) Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di antara satu nasionalitas.⁶

⁴Sutarjo Adikusilo, *Nasionalisme-Demokrasi-Civil Society*, <https://www.usd.ac.id/ lembaga/lppm/...>, diakses pada tanggal 5 maret 2018

⁵*Ibid.*,

⁶Snyder dalam Sutarjo Adikusilo, *Ibid.*,

Praksis nasionalisme yang disemangati dengan euforia reformasi, bergerak ke segala arah dan perombakan mendasar dalam sistem kenegaraan terjadi. Hal ini membelah masyarakat menjadi tiga kelompok dominan, yaitu: *Pertama*, kelompok yang terbakar oleh nasionalisme tapi perspektifnya lokalitas, *kedua*, kelompok yang secara ekstrim memandang bahwa nasionalisme tidak perlu lagi (cukup disimpan di dalam saku), dan *ketiga*, kelompok masyarakat yang memandang nasionalisme itu harus tumbuh di taman sari globalisme.⁷

Kelompok pertama menganggap otonomi daerah, yang aslinya dimaksudkan sebagai kebijakan untuk mendekatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, dipandang sebatas perubahan fundamental tata pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Akibatnya, di sebagian besar wilayah Tanah Air, bukan desentralisasi yang tumbuh tetapi perjuangan lokalitas. Kewenangan daerah yang besar khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumberdaya alam menjadi sandungan bagi krisis hubungan pusat dan daerah. “raja-raja kecil” muncul dan nasionalisme lantas menjelma menjadi semacam perjuangan kedaerahan berhadapan dengan pusat kekuasaan negara. Selain itu, juga muncul aksi-aksi terorisme yang tak bisa dilepaskan begitu saja dari isu-isu lokal dan kepentingan kelompok. Sebuah ekspresi nasionalisme yang keliru dalam tatanan berbangsa dan bernegara.

Sisi lain, kehidupan politik menghasilkan paket kebijakan demokrasi yang hampir secara absolut menghargai kebebasan berekspresi individu. Ini membuat sebagian masyarakat (kelompok kedua) menganggap bahwa hanya dengan membuka pintu seluas-luasnya bagi kehadiran globalisme, mengintegrasikan Indonesia secara penuh pada gelombang globalisme dengan tanpa restriksi, kita akan hidup lebih makmur. Aliran ini boleh disebut secara diametral bertentangan dengan kelompok pertama. Bagi mereka, nasionalisme apalagi yang lokalitas dianggap sebagai kebodohan dan absurd. Oleh sebab itu, nasionalisme cukup ditaruh di kantong saja.

⁷Soengeng Sarjadi, Menjalankan Konstitusi: Nasionalisme Kosmopolit Indonesia, *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI* No. 28, 2013, hlm 128-129

Sehubungan dengan hal tersebut, **Soegeng Sarjadi mengatakan bahwa** kelompok ketiga yang memandang roh nasionalisme harus tetap hidup di tengah taman sari globalisme. Kelompok yang memanggul nasionalisme lokalitas maupun tanpa nasionalisme (cukup ditaruh di saku saja), apabila bergerak terlalu ekstrim berpotensi membelah kelangsungan hidup bangsa (Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI). Jika hal itu terjadi berarti generasi baru bangsa Indonesia telah gagal menjaga warisan para bapak bangsa, yaitu “menjaga Republik”. Padahal Republik hanya bisa dijaga dan tegak berdaulat apabila seluruh anak bangsa menjalankan konstitusi yang menjadi konsensus bersama. Tanpa itu, seluruh gerak kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tanpa arah.⁸

Kualifikasi kelompok masyarakat yang digambarkan Soegeng Sarjadi dapat dievaluasi bahwa menguatnya politik identitas yang mengedepankan feodalisme dan hegemoni agama adalah karakter bangsa yang jauh dari nilai-nilai nasionalisme. Sebab, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasar pada semangat nilai-nilai nasionalisme yang mana rasa menghargai dan menghormati perbedaan adalah suatu keniscayaan. Munculnya gerakan separatis adalah bagian dari dominasi feodalisme dan hegemoni agama yang tidak kunjung berakhir. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi yang demikian menjadi ancaman bagi Indonesia apabila kelompok masyarakat sudah ditunggangi oleh korporasi/negara lain untuk dijadikan alat pemberontakan dan pengacau dalam negara.

b. Upaya Merekatkan Semangat Nasionalisme

Menurut David Apter, jika nasionalisme dipahami dalam kerangka ideologi, maka di dalamnya terkandung aspek: *Pertama, cognitive* yaitu aspek yang mengandaikan perlunya pengetahuan atau pemahaman akan situasi konkret sosial, ekonomi, politik dan budaya bangsanya. Jadi nasionalisme adalah cermin abstrak dari keadaan kehidupan konkret suatu bangsa. Maka peran aktif kaum intelektual dalam pembentukan semangat nasional amatlah penting, sebab mereka itulah yang harus merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan menuangkannya sebagai unsur cita-cita bersama yang ingin diperjuangkan.

⁸*Ibid.*,

Kedua, goal/value orientation yaitu aspek yang menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama di masa datang yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan di dalam masyarakat dan negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik, ideologi dan budaya yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasionalisme Indonesia mula-mula berjuang untuk mengusir penjajah Belanda, merontokan feodalisme, primordialisme dan membentuk negara bangsa (*nation state*) yang merdeka, sejahtera dan demokratis, sebagai rumah bersama untuk seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke. Negara bangsa Indonesia adalah rumah bersama di mana kebhinnekaan suku, budaya, agama dan tradisi dijamin sehingga semua warga bangsa dapat hidup damai, sejahtera dan bebas.

Ketiga, strategic yaitu aspek menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moril atau spirituil, dapat bersifat moderat atau radikal, dapat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan lain-lain. Kiat mana yang dipilih akan tergantung pada situasi, kondisi konkret dan waktu setempat yang dihadapi oleh suatu bangsa.⁹

Pandangan Apter sesungguhnya ingin memberikan suatu penegasan bahwa nasionalisme harus berbasis pada edukasi, nilai dan tindakan nyata dalam bentuk perjuangan atau jihad untuk menginternalisasi semangat nasionalisme ke dalam diri masyarakat Indonesia. Ciri khas nasionalisme adalah bagaimana warga negara mampu bersatu dalam rumpun yang berbeda dan tetap harmonis ditengah gesekan sosial yang semakin kompleks. Nasionalisme Indonesia adalah bercita rasa integralistik yang subtansinya tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan memadukan segala keanekaragaman menjadi suatu persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan berbangsa dan negara.

Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk

⁹David Apter dalam Sutarjo Adisusilo, *Op.Cit*

membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga negara Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan mencintai bangsa dan negara Indonesia. Kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (*chauvinisme*) tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas menceraikan beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut *chauvinisme*. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.¹⁰

Semangat nasionalisme Pancasila menggiring masyarakat ke dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil yang kondusif. Prasyarat yang harus dipenuhinya adalah keinginan warga negara dalam merawar kecintaan terhadap tanah air seperti kesadaran bela negara yang diyakini sebagai cara untuk memperkokoh semangat nasionalisme.

¹⁰Yudi Latief et.al, Nasionalisme, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015, hlm 1-2

Kesadaran bela negara itu hakekatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, lebih luas dari sekedar waspada, dari yang paling halus hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata dari musuh. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bela negara memiliki unsur yang mampu menjamin tegak kokohnya negara kesatuan Indonesia. Joko Riyanto menjelaskan bahwa Unsur Dasar Bela Negara sebagai berikut:¹¹

- a. Cinta Tanah Air
- b. Kesadaran Berbangsa dan bernegara
- c. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara

Hal ini sejalan dengan teori Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*-nya, bahwa asal-usul negara-bangsa adalah adanya rasa kebersamaan dalam kelompok. Menurut Ibnu Khaldun hal itu timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang dikaitkan dengan adanya pertalian darah ataupun karena pertalian klan (kaum). Yang ia maksudkan dengan “*ashabiyah*” adalah “rasa cinta” (*nu'rat*) setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hamba-hamba-Nya.

Perasaan cinta kasih tersebut teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka, ataupun musibah yang menyimpannya. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan. Dari sini kemudian muncul apa yang dikenal dengan nasionalisme yang menurut hemat penulis, nasionalisme dalam Islam harus disertai dengan adanya: (1) cinta tanah air, ini karena “*hubbul watan minal iman*” cinta tanah air sebagian dari iman; (2) kebersamaan yang disertai jiwa patriotisme melawan segala

¹¹Joko Riyanto, *Kewaspadaan Nasional Bela Negara Dan Integrasi Nasional*, Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan VOLUME 67/ NOMOR 51, Puskom Publik Kemhan, Jakarta, 2017, hlm. 9

bentuk penjajahan demi membela harkat dan martabat suatu bangsa.¹²

Semangat nasionalisme harus digelorakan kepada semua warga negara guna memperkokoh keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua stakeholder khususnya di lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai-nilai nasionalisme dalam diri warga negara.

III. Simpulan

Salah satu dampak negatif dari reformasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Menguatnya isu SARA, gerakan separatis, kekerasan, tindakan teroris dan tumbuhnya feodalistik memicu degradasi nasionalisme yang berujung pada instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berbahaya karena kondisi yang demikian menjadi ancaman bagi Indonesia apabila kelompok masyarakat sudah ditunggangi oleh korporasi/negara lain untuk dijadikan alat pemberontakan dan pengacau dalam negara.

Penanaman nilai-nilai nasionalisme adalah pilihan yang tepat untuk mereduksi gerakan negatif yang ingin memecah-belah bangsa. Ciri khas nasionalisme adalah bagaimana warga negara mampu bersatu dalam rumpun yang berbeda dan tetap harmonis ditengah gesekan sosial yang semakin kompleks. Nasionalisme indonesia adalah bercita rasa integralistik yang substansinya tidak membedakan masyarakat atau warga negara atas dasar golongan atau yang lainnya, melainkan memadukan segala keanekaragaman menjadi suatu persatuan dan kesatuan dalam berkehidupan berbangsa dan negara.

Semangat nasionalisme Pancasila menggiring masyarakat ke dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang stabil yang kondusif. Prasyarat yang harus dipenuhinya adalah keinginan warga negara dalam merawar kecintaan terhadap tanah air seperti kesadaran bela negara yang diyakini sebagai cara untuk memperkokoh semangat nasionalisme. Selain itu, semangat nasionalisme harus digelorakan kepada semua warga negara guna

¹²Abdul Mustaqim, *Op. Cit*, hlm. 115

memperkokoh keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan apabila didukung oleh semua stakeholder khususnya di lembaga pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ketiganya memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai-nilai nasionalisme dalam diri warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, Bela Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad), *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011
- Joko Riyanto, Kewaspadaan Nasional Bela Negara Dan Integrasi Nasional, Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan VOLUME 67/ NOMOR 51, Puskom Publik Kemhan, Jakarta, 2017
- M Alfian Alfian, Refleksi Nasionalisme Indonesia di Era Pragmatisme Global, *Jurnal Sekretariat Negara RI*, No. 17, Agustus 2010
- Soengeng Sarjadi**, Menjalankan Konstitusi: Nasionalisme Kosmopolit Indonesia, *Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI* No. 28, 2013
- Sutarjo Adisusilo, Nasionalisme-Demokrasi-Civil Society, <https://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/...>, diakses pada tanggal 5 November 2018
- Tjipta Lesmana, Bela Negara Dan Ancaman Budaya Kekerasan, Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan, Puskom Publik Kemhan, Jakarta, 2016
- Yudi Latief et.al, Nasionalisme, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2015